

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Ukraina

Nur Rohim Yunus*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5i2.38432](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.38432)

Abstract:

The Ukrainian government is a presidential system, and the country is a unitary, democratic republic. Unitary states are characterized by the concentration of political and administrative power within the central government, which is located in Kiev. The president is the head of state and the head of government. He is elected by the people directly, which makes him the head of government as well as the head of state. In addition, the Prime Minister of Ukraine is the individual who is accountable for the day-to-day implementation of the policies that are implemented by the government. Ukraine's political structure displays a combination of aspects of presidential and parliamentary systems of government, with the prime minister lending a parliamentary feel to a traditionally presidential framework.

Keywords: Ukraina; Form of state; Form of government; Government system

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

A. PROLOG

Salah satu negara yang bisa ditemukan di Eropa Timur adalah Ukraina. Memiliki budaya yang kaya dan sejarah masa lalu yang beragam, bangsa ini memiliki sejarah yang kaya sekaligus kompleks. Dengan Belarus di utara, Rusia di timur dan timur laut, Polandia, Slovakia, dan Hongaria di barat, serta Rumania dan Moldova di selatan, Ukraina terletak di Eropa Timur. Perbatasannya mencakup seluruh wilayah.

Sejak zaman kuno, Ukraina telah menjadi pusat peradaban. Sepanjang sejarah, sejumlah besar peradaban telah menguasai wilayah ini, antara lain



Kekaisaran Kievan Rus, Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Austro-Hongaria. Pada abad ke-20, Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet.

Ukraina baru secara resmi mencapai kemerdekaannya pada tahun 1991, setelah pembubaran Uni Soviet.¹

Budaya Ukraina cukup beragam, mencakup beragam gaya seni, musik, sastra, dan tarian. Kesenian rakyat asal Ukraina, termasuk lukisan telur

¹ Lvova, I. (2023). Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine:[Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine]. *Studia Prawnicze/The Legal Studies*, (2 (228)), 31-44.

Paskah, merupakan salah satu ciri budaya yang paling terkenal di seluruh dunia. Meskipun bahasa Rusia digunakan oleh banyak orang di lokasi tertentu, bahasa resminya adalah bahasa Ukraina. Ketegangan yang terjadi antara penutur bahasa Rusia dan Ukraina merupakan masalah yang mempengaruhi politik dan budaya negara tersebut.

Batubara, besi, dan baja hanyalah beberapa dari bisnis berbasis sumber daya alam yang berkontribusi terhadap keragaman perekonomian Ukraina, yang juga memiliki sektor pertanian produktif. Di sisi lain, bangsa dihadapkan pada permasalahan ekonomi seperti permasalahan politik dan korupsi, yang keduanya berdampak pada pertumbuhan perekonomian.²

Republik Demokratik Ukraina adalah negara yang beroperasi di bawah bentuk pemerintahan presidensial. Meskipun demikian, negara ini dihadapkan pada sejumlah kendala politik sejak memperoleh kemerdekaan. Tantangan tersebut antara lain perselisihan dengan Rusia, termasuk aneksasi Rusia atas Krimea, serta konflik di wilayah Donbas yang terletak di sebelah timur Ukraina. Hubungan antara Ukraina dan negara-negara tetangganya, khususnya dengan Rusia, penuh dengan kompleksitas. Selain itu, negara-negara Barat mempunyai kepentingan strategis di Ukraina,

² Metelska-Szaniawska, K. (2009). Constitutions and economic reforms in transition: an empirical study. *Constitutional Political Economy*, 20, 1-41.

khususnya mengingat krisis di Krimea dan pertempuran di Donbas.³

Ukraina merupakan negara yang memiliki banyak potensi, namun juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang cukup besar, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan keamanan.⁴

Ukraina memiliki Undang-Undang Dasar Ukraina (Ukraina: Конституція України, Konstytutsiia Ukrainy). Ia adalah undang-undang dasar yang berlaku di Ukraina. Undang-Undang Dasar tersebut diterima dan disahkan oleh Verkhovna Rada (parlemen Ukraina) pada tanggal 28 Juni 1996. Undang-Undang Dasar tersebut disetujui dengan 315 suara dari 450 suara (minimal 300 suara agar dapat disetujui).



³ Yevtushenko, O. (2013). Local Government in Political System of Ukraine: Constitutional and Legal Bases. Public policy and economic development, (4), 62-69.

⁴ Slukhai, S. (2008). Funding local government in Ukraine. In Local public finance in Central and Eastern Europe (pp. 434-454). Edward Elgar Publishing.

Di Ukraina, semua kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan harus mematuhi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar. Penggunaan hak untuk mengubah Konstitusi memerlukan proses legislatif tersendiri yang secara eksklusif dipercayakan kepada Verkhovna Rada. Mahkamah Konstitusi Ukraina adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang untuk menafsirkan Konstitusi dan melakukan penilaian legislatif. Hari Konstitusi resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak tahun 1996, dengan tanggal 28 Juni sebagai hari resminya.⁵

Tahun 2004 menjadi saksi penerimaan dan pemberlakuan amandemen Konstitusi Ukraina, yang mengakibatkan perubahan substansial terhadap kerangka politik negara tersebut. Perubahan ini kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 2004. Pada tahun 2010, amandemen tersebut dicabut oleh Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, sebagai tanggapan atas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina. Setelah terjadinya Euromaidan (2013–2014), penyesuaian yang dilakukan pada tahun 2004 kemudian dipulihkan.⁶

⁵ Wolczuk, K. (2001). *The moulding of Ukraine: the constitutional politics of state formation*.

⁶ Tyushka, A. (2022). *Revolutionary Constitutionalism: Constitutional Order, Contentious Constitutional Politics and Participatory Constitutional Change in Ukraine since 1990*. (2022), *Dynamics of Contemporary Constitutionalism in Eurasia: Local Legacies and Global Trends*, 117-148.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Negara Ukraina dan Implikasinya dalam Pembagian Wilayah

Ukraina adalah negara kesatuan. Oleh karena itu, kemampuan mengambil keputusan politik dan administratif terkonsentrasi pada pemerintah pusat di Kiev. Ketika suatu negara dibentuk sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang dapat diterapkan di seluruh negara. Hal ini menghilangkan kebutuhan otonomi besar bagi berbagai daerah di negara ini.

Pemerintah pusat Ukraina menjalankan wewenang penuh atas seluruh aspek pemerintahan negara, termasuk pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter, dan keamanan nasional. Dalam kerangka konstitusi Ukraina, wilayah tertentu diberikan otonomi pada tingkat tertentu; namun, pemerintah pusat tetap memegang mayoritas kekuasaan dan mengambil keputusan paling penting.⁷



⁷ Fedorenko, V. (2016). Local Self-Government Reform in the Independent Ukraine: Concepts, Priorities, Prospects. *Ukrainian J. Const. L.*, 47.

Sistem negara kesatuan ini juga terwakili dalam organisasi pemerintahan Ukraina, yang terdiri dari pemerintahan daerah yang dipimpin oleh pemerintah pusat dan gubernur yang dipilih oleh presiden. Selain itu, undang-undang dan kebijakan negara diterapkan dengan cara yang sama di seluruh Ukraina, namun tidak ada perbedaan mencolok antar wilayah. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Ukraina adalah negara kesatuan, yang berarti kekuasaan politik dan administratif dijalankan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Kiev.

Untuk memajukan administrasi dan pemerintahan yang efektif, Ukraina, yang merupakan negara kesatuan, mengatur pembagian wilayahnya secara sistematis. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa wilayahnya dikelola dengan sukses, layanan publik tersedia, dan negara secara keseluruhan tetap stabil.

Ada sejumlah wilayah administratif di Ukraina yang disebut sebagai "oblast" (terkadang dikenal sebagai provinsi). Saat ini, Ukraina terdiri dari 24 oblast dan satu kota republik, yang dikenal sebagai Kiev (Kyiv). Kiev, yang merupakan ibu kota Ukraina, memiliki posisi unik di negaranya.⁸

Istilah "raion" mengacu pada kumpulan distrik administratif kecil yang tersebar di setiap oblast.

⁸ Ladychenko, V., Gulac, O., Yemelianenko, K., Danyliuk, Y., & Kurylo, V. (2021). Ensuring Sustainable Development of Local Self-Government: Foreign Experience for Ukraine. *European Journal of Sustainable Development*, 10(4), 167-167.



Raion ini berfungsi sebagai unit administratif yang lebih kecil yang terletak di bawah tingkat provinsi. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan publik dan administrasi lokal pada tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.

Meskipun Ukraina adalah negara kesatuan, wilayah tertentu, seperti Krimea, Donetsk, dan Luhansk, memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini terjadi sebelum terjadinya konflik di semenanjung tersebut. Karena status otonomi ini, yang diatur oleh konstitusi Ukraina, wilayah-wilayah ini diberikan hak-hak tertentu dalam pengaturan kebijakan tertentu.

Selain itu, beberapa kota besar di Ukraina memiliki posisi unik sebagai pusat ekonomi dan budaya di negara tersebut. Salah satunya adalah Kiev (Kyiv), yang berfungsi sebagai ibu kota negara. Kiev dianggap setara dengan oblast dan memiliki pemerintahan lokal otonom dengan status yang sama.

Dengan pembagian wilayah yang metodis ini, Ukraina mampu mengelola administrasi dan pemerintahan negaranya secara efektif, memastikan bahwa layanan publik disediakan secara adil di seluruh wilayah, dan menjaga stabilitas politik dan sosial negara tersebut tetap utuh.

2. Bentuk Pemerintahan Ukraina dan Implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

Ukraina diklasifikasikan sebagai republik dan bukan monarki. Sistem politik Ukraina didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana kepala negara dan pemerintahan dipilih oleh rakyat, baik melalui cara langsung atau tidak langsung, untuk jangka waktu tertentu.⁹

Presiden Ukraina menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara tersebut. Presiden dipilih oleh rakyat sendiri melalui proses pemilihan umum untuk masa jabatan yang berlangsung selama lima tahun.¹⁰

Presiden Ukraina bertanggung jawab menunjuk seorang perdana menteri untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan Ukraina. Sebagai pemimpin pemerintahan, Perdana Menteri bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari serta pelaksanaan kebijakan. Presiden juga bertanggung jawab untuk menunjuk anggota kabinet, dan dia melakukannya ketika perdana menteri memberikan saran.

Parlemen Ukraina, juga disebut sebagai Verkhovna Rada, adalah badan legislatif yang terdiri

⁹ Zvarych, R. (2022). Problems Of Summonses During Martial Law In The Republic Of Ukraine. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, (2), 71-77.

¹⁰ Chernenzenko, E. (2018). Local self-government in Ukraine: current state and main directions of development. *Legea și Viața*, 323(11/2), 138-143.

dari anggota parlemen yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Verkhovna Rada diberi wewenang untuk membuat undang-undang, memberikan persetujuannya kepada anggaran negara, dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintah.

Pemerintahan dan sistem politik Ukraina diatur oleh konstitusi, yang berfungsi sebagai fondasi struktur negara. Konstitusi Ukraina saat ini dikeluarkan pada tahun 1996 dan menguraikan gagasan dasar demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia. Hal ini diadopsi oleh rakyat Ukraina.

Dengan struktur pemerintahan seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa Ukraina adalah sebuah republik yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana rakyat adalah sumber kekuasaan politik dan dijalankan dengan cara yang melayani kepentingan rakyat.

Sistem pemerintahan yang digunakan Ukraina adalah republik yang artinya kekuasaan dibagi antara wakil rakyat terpilih dan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden.¹¹

Verkhovna Rada adalah badan perwakilan legislatif rakyat Ukraina. Ia juga berfungsi sebagai badan yang mewakili rakyat. Anggotanya, yang disebut Deputi, dipilih oleh masyarakat umum dalam

¹¹ Derevyanko, B. (2022). Considering the provisions of the Constitution of Ukraine in decision-making by local courts.

pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. Verkhovna Rada tidak hanya mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, tetapi juga mempunyai yurisdiksi untuk menyetujui anggaran negara dan melakukan tugas pengawasan terhadap pemerintahan.¹²

Presiden Ukraina adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Ukraina. Ia dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang berlangsung selama lima tahun. Selain mempunyai kekuasaan eksekutif, Presiden juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara serta pemeliharaan pemerintahan sendiri dan keamanan Ukraina. Terlepas dari kenyataan bahwa presiden bertanggung jawab atas pemerintahan, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan berada di bawah pengawasan Verkhovna Rada.



¹² Deshko, L. M., & Hospodarets, D. M. (2023). The interaction of the President of Ukraine with the Parliament and bodies of the executive power: problems of theory and practice. *Visegrad Journal on Human Rights*, (1), 76-81.

Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ukraina, sebagaimana diatur oleh Konstitusi. Meskipun presiden adalah kepala negara dan Verkhovna Rada adalah badan legislatif, kekuasaan yang dimiliki masing-masing dibatasi oleh konstitusi dan sistem checks and balances yang melarang satu kekuasaan mendominasi kekuasaan lain.¹³

Presiden Ukraina bertanggung jawab menunjuk seorang perdana menteri untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan Ukraina. Selain bertanggung jawab atas operasional pemerintahan sehari-hari, Perdana Menteri dan Kabinetnya juga bertugas menerapkan kebijakan. Mereka bekerja di bawah pengawasan langsung presiden dan juga Verkhovna Rada.

Akibat hadirnya lembaga-lembaga perwakilan rakyat terpilih dalam sistem pemerintahan republik Ukraina, seperti Verkhovna Rada, maka kekuasaan politik di negara ini turut serta diikuti oleh sejumlah pihak yang berbeda, hal ini merupakan gambaran cita-cita demokrasi perwakilan.

3. Sistem Pemerintahan Ukraina dan Implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan

Ukraina menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden adalah kepala negara

¹³ Zozulia, O. I., Zozulia, I. V., & Dovhan, O. I. (2023). Legal regulation of foreign affairs governance: foreign experience for Ukraine.

sekaligus kepala pemerintahan, dan dia juga memegang kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, dalam situasi khusus ini, perdana menteri bertanggung jawab atas fungsi tambahan, meskipun faktanya fungsi tersebut tidak secara konstitusional dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan presidensial.

Di Ukraina, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi sehari-hari pemerintahan. Mereka diangkat oleh presiden Ukraina, yang merupakan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan Verkhovna Rada (parlemen Ukraina).¹⁴

Meskipun posisi perdana menteri tidak diakui secara formal dalam sistem presidensial, fakta bahwa posisi tersebut ada di Ukraina menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem pemerintahan Ukraina memiliki elemen sistem semi-presidensial. Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebaliknya, presiden tetap menjadi tokoh terpenting dalam sistem ini dan mempunyai kekuasaan administratif yang signifikan.

Fungsi perdana menteri dan kabinetnya menambah kompleksitas praktik sistem semi-presidensial, meskipun faktanya Ukraina mengklaim

¹⁴ Samsin, I. L. (2021). THE CURRENT STATE OF UKRAINE'S LEGISLATION AND THE PROBLEMS OF ITS INTERVENTION. Publishing House "Baltija Publishing".

memiliki gaya pemerintahan presidensial dalam konstitusi tertulisnya.

Posisi yang kuat diberikan kepada lembaga kepresidenan sebagai hasil dari bentuk pemerintahan presidensial di Ukraina. Presiden Ukraina, yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, diberikan wewenang eksekutif dalam jumlah besar karena Ukraina adalah negara yang beroperasi di bawah sistem pemerintahan presidensial.

Presiden Ukraina tidak hanya merupakan representasi negara, namun ia juga memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan cabang pemerintahan lainnya. Mengingat presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, ia memiliki kekuasaan eksekutif yang luas yang memungkinkan mereka mengambil keputusan tentang kebijakan negara, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan mengarahkan kegiatan administrasi negara.¹⁵

Kekuasaan eksekutif yang signifikan dipegang oleh Presiden Ukraina, yang bertanggung jawab mengarahkan administrasi pemerintahan dan menetapkan kebijakan. Presiden adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri, membentuk kabinet, dan mengawasi

¹⁵ Teterin, K. Y. (2021). SOME ASPECTS OF NORMATIVE AND LEGAL PROVISION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES. *Восточно-европейский научный журнал*, (5-2 (69)), 40-44.

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Presiden Ukraina adalah orang yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri negaranya. Ia diberi wewenang untuk memilih arah kebijakan luar negeri Ukraina, bertindak sebagai wakil negara di forum internasional, dan mengelola hubungan diplomatik dengan negara lain.

Presiden Ukraina memimpin angkatan bersenjata negara tersebut dan menjabat sebagai panglima tertinggi. Ia tidak hanya mempunyai



kekuasaan untuk memerintah dan memimpin angkatan bersenjata, tetapi ia juga mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan negara.¹⁶

Oleh karena itu, lembaga kepresidenan memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial yang ada di Ukraina. Berbagai macam masalah politik, ekonomi, dan keamanan nasional termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab presiden, yang mencakup keseluruhan kehidupan Ukraina.

¹⁶ Chaban, N., & Vernygora, V. (2010). Ukraine's constitutional "saga": Ukrainian media reflections of the constitutional process.

Posisi Perdana Menteri Ukraina, yang menjabat sebagai pemimpin eksekutif pemerintahan, merupakan posisi penting dalam kerangka sistem pemerintahan Ukraina. Terlepas dari kenyataan bahwa Ukraina adalah negara yang beroperasi di bawah bentuk pemerintahan presidensial, fungsi perdana menteri tetap memiliki dampak yang besar terhadap administrasi negara tersebut.

Di Ukraina, posisi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Tanggung jawab perdana menteri adalah mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari, serta pengelolaan proses birokrasi dan penyelenggaraan urusan negara, meskipun presiden adalah kepala negara.¹⁷

Sejalan dengan konstitusi Ukraina, Presiden Ukraina adalah orang yang bertanggung jawab untuk menunjuk Perdana Menteri. Presiden juga mempunyai wewenang untuk memberhentikan Perdana Menteri dari pekerjaannya. Meskipun demikian, Verkhovna Rada, yang merupakan parlemen Ukraina, harus memberikan persetujuannya sebelum perdana menteri dapat diangkat.

Baik itu kabinet atau dewan menteri, pembentukan pemerintahan Ukraina berada di bawah wewenang Perdana Menteri. Dia bertanggung jawab untuk memilih menteri kabinet yang akan

¹⁷ Trykhlil, K. (2019). Law-making activity in the case law of the constitutional court of Ukraine. *International and Comparative Law Review*, 19(2), 27-75.

membantu pengelolaan berbagai departemen dan tugas pemerintah, antara lain pertahanan, urusan internasional, ekonomi, dan keuangan.

Perdana Menteri adalah orang paling penting yang bertugas menciptakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Bekerja sama erat dengan kabinetnya, ia merancang strategi kebijakan dan inisiatif pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat keamanan nasional.

Terdapat persyaratan bahwa Perdana Menteri harus bertanggung jawab kepada Verkhovna Rada atas kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan pemerintahannya. Ia sering memberikan laporan kepada parlemen, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen, dan mengambil bagian dalam diskusi yang diadakan di parlemen.¹⁸

Akibatnya, Perdana Menteri memainkan peran penting dalam sistem administrasi di Ukraina, meskipun wewenangnya dibatasi oleh bentuk pemerintahan presidensial dan pengawasan Verkhovna Rada. Dalam menjalankan administrasi negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah, Perdana Menteri adalah pemimpin eksekutif pemerintahan dan bekerja sama dengan Presiden untuk mencapai tujuan tersebut.

¹⁸ Riaboshapko, L. (2014). Constitutional Relations in Ukraine: Experience, Contradictions, European Context. *Віче*, (8), 4-6.

C. EPILOG

Sistem ketatanegaraan Ukraina menunjukkan karakteristik yang berbeda melalui masuknya Perdana Menteri ke dalam struktur pemerintahan presidensial. Ukraina, sebagai sebuah negara, beroperasi di bawah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden mempunyai peran eksekutif utama. Namun, masuknya Perdana Menteri memasukkan unsur parlementer ke dalam kerangka pemerintahan. Hal ini mengarah pada kerangka pemerintahan yang memiliki aspek dari sistem presidensial dan parlementer.

Peran Perdana Menteri Ukraina meliputi pelaksanaan kebijakan rutin pemerintah, pembentukan kabinet, dan pengembangan inisiatif pemerintah. Presiden memegang pengaruh penting dalam merumuskan keputusan kebijakan, sementara perdana menteri mengemban tugas khusus dalam mengelola pemerintahan suatu negara.

Akuntabilitas Perdana Menteri atas kebijakan dan tindakan pemerintahannya kepada Verkhovna Rada, parlemen Ukraina, memperkenalkan elemen parlementer ke dalam gaya pemerintahan presidensial. Proses pengambilan keputusan melahirkan hubungan dinamis antara pemerintah dan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Ukraina, kehadiran Perdana Menteri memperkenalkan elemen parlementer ke dalam pemerintahan presidensial

secara historis. Fenomena ini memunculkan kerangka pemerintahan tersendiri yang menggabungkan komponen-komponen dari beberapa sistem pemerintahan, sehingga mencerminkan proses politik dan kelembagaan khusus di Ukraina.

REFERENSI:

- Chaban, N., & Vernygora, V. (2010). Ukraine's constitutional" saga": Ukrainian media reflections of the constitutional process.
- Chernezhenko, E. (2018). Local self-government in Ukraine: current state and main directions of development. *Legea și Viața*, 323(11/2), 138-143.
- Derevyanko, B. (2022). Considering the provisions of the Constitution of Ukraine in decision-making by local courts.
- Deshko, L. M., & Hospodarets, D. M. (2023). The interaction of the President of Ukraine with the Parliament and bodies of the executive power: problems of theory and practice. *Visegrad Journal on Human Rights*, (1), 76-81.
- Fedorenko, V. (2016). Local Self-Government Reform in the Independent Ukraine: Concepts, Priorities, Prospects. *Ukrainian J. Const. L.*, 47.
- Ladychenko, V., Gulac, O., Yemelianenko, K., Danyliuk, Y., & Kurylo, V. (2021). Ensuring Sustainable Development of Local Self-Government: Foreign Experience for Ukraine.

European Journal of Sustainable Development, 10(4), 167-167.

- Lvova, I. (2023). Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine:[Constitutional law matters of sustainable development under martial law: The case of Ukraine]. *Studia Prawnicze/The Legal Studies*, (2 (228)), 31-44.
- Metelska-Szaniawska, K. (2009). Constitutions and economic reforms in transition: an empirical study. *Constitutional Political Economy*, 20, 1-41.
- Riaboshapko, L. (2014). Constitutional Relations in Ukraine: Experience, Contradictions, European Context. *Віче*, (8), 4-6.
- Samsin, I. L. (2021). The Current State Of Ukraine's Legislation And The Problems Of Its Intervention. Publishing House "Baltija Publishing".
- Slukhai, S. (2008). Funding local government in Ukraine. In *Local public finance in Central and Eastern Europe* (pp. 434-454). Edward Elgar Publishing.
- Teterin, K. Y. (2021). Some Aspects Of Normative And Legal Provision Of Human Rights Protection In Ukraine And Foreign Countries. *Восточно-европейский научный журнал*, (5-2 (69)), 40-44.

- Trykhlid, K. (2019). Law-making activity in the case law of the constitutional court of Ukraine. *International and Comparative Law Review*, 19(2), 27-75.
- Tyushka, A. (2022). Revolutionary Constitutionalism: Constitutional Order, Contentious Constitutional Politics and Participatory Constitutional Change in Ukraine since 1990. (2022), *Dynamics of Contemporary Constitutionalism in Eurasia: Local Legacies and Global Trends*, 117-148.
- Wolczuk, K. (2001). The moulding of Ukraine: the constitutional politics of state formation.
- Yevtushenko, O. (2013). Local Government in Political System of Ukraine: Constitutional and Legal Bases. *Public policy and economic development*, (4), 62-69.
- Zozulia, O. I., Zozulia, I. V., & Dovhan, O. I. (2023). Legal regulation of foreign affairs governance: foreign experience for Ukraine.
- Zvarych, R. (2022). Problems Of Summonses During Martial Law In The Republic Of Ukraine. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, (2), 71-77.

